

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK PUNGUTAN LIAR PADA
BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BULUKUMBA
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

MUHAMMAD ASKAR

NIM: 10300113228

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Askar
Nim : 10300113228
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang/07 Juli 1993
Fakultas/Program : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Alamat : Jl. Paccinongan
Judul : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dalam upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar pada Bidang Pendidikan di Kabupaten Bulukumba dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, uraian, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 09 Agustus 2017

Penyusun,



Muhammad Askar

NIM: 10300113228

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar pada Bidang Pendidikan di Kabupaten Bulukumba (Perspektif Hukum Islam)”, yang disusun oleh Muhammad Askar, NIM: 10300113228, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 M, bertepatan dengan 9 Dzulhijjah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 31 Agustus 2017 M.
9 Dzulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Dr. Dudung Abdullah, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Dr. Hamzah Hasan, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hamsir, M.Hum	(.....)
Pembimbing II	: Abd. Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, tiada kata yang lebih patut diucapkan oleh seorang hamba selain segala puji syukur kita kehadirat Allah swt. Tuhan yang maha mengetahui, pemilik segala ilmu, karena atas petunjuk-Nya beserta nikmat-Nya sehinggalah skripsi yang berjudul: **IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK PUNGUTAN LIAR PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BULUKUMBA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)** dapat diselesaikan. Adapun skripsi ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar.

Merangkai kata menjadi kalimat, kemudian membahas dan menyatukan menjadi suatu karya ilmiah merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk secepatnya diselesaikan karena diperlukan pemikiran, dan konsentrasi penuh untuk dapat mewujudkannya.

Dari lubuk hati yang terdalam penulis mengucapkan permohonan maaf dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Abdul Karim dan ibunda Jumria tercinta yang dengan penuh cinta dan kesabaran serta kasih sayang dalam membesarkan, mendidik, dan mendukung penulis dan tidak henti-hentinya memanjatkan doa demi keberhasilan dan kebahagiaan penulis, juga untuk saudariku tersayang, Ismi dan Ilmi, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Begitu pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Aladdin Makassar.
3. Dra. Nila Sastrawati, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Dan Ketataengaraan dan Dr. Kurnati, S.Ag., M. Hi selaku Sekertaris Jurusan.
4. Dr. Hamsir, SH., M. Hum dan Abdul Rahman Kanang, M. Pd., Ph. D selaku pembimbing I dan pembimbing II yang selalu bijaksana memberikan masukan dan arahan mengenai penulisan skripsi ini.

5. Abdul Rahman S.Hi terima kasih telah membimbing dan memberikan dukungan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Muhammad Yusril Abni atas kerja samanya menemani selama proses jalannya penelitian.
7. Sahabat Rumah Bujang
8. Polres Bulukumba yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan penelitian.
9. Terima kasih kepada saudara seperjuangan Albar, Alvin, Asran, Ayu setiawati, Akram, Hajar, Ikbil, Imam, Riswan, Sri Risky Ayu, Yari dan wahyu maaf tidak bisa tulis semuanya.
10. Teman-teman kelas Hukum Pidana dan Ketatanegaraan E yang telah mengajarkan penulis memahami hakikat menjadi mahasiswa selama menjalani bangku perkuliahan.
11. Seluruh pihak yang sedikit berkontribusi atas penyelesaian penelitian dan skripsi ini yang tidak mampu disebutkan satu-persatu. Tidak disebutkan bukan berarti mengurangi esensi kalian.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahaan hati penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritikan yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima secara penuh oleh halayak umum. Semoga Allah swt, selalu menaungi kita sekalian dengan rahmat-Nya dan semoga Allah swt, akan menilai dan menakar produk kerja keras ini sebagai amal badah yang berkelanjutan disisi-Nya. Amin.

Makassar , 09 Agustus 2017

Muhammad Askar
NIM: 10300113228

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pungutan Liar di Indonesia	13
1. Pengertian Pungutan Liar	13
2. Pungutan Liar di Indonesia	14
B. Pungutan Liar dalam KUHP	18
C. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar	22
D. Dampak Pungutan Liar dalam Masyarakat	25
E. Pungutan Liar dalam Perspektif Hukum Islam	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	30
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Instrumen Penelitian	31
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Bentuk Aturan Hukum tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.....	36
C. Implementasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pada Bidang Pendidikan serta Faktor Pendukung dan Penghambat Satgas Saber Pungli di Kabupaten Bulukumba	41
D. Pandangan Hukum Islam terhadap Ketentuan dan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Implikasi Penelitian	60

DAFTAR PUSTAKA.....	61
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
Y	Ya		Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...ى	Fathah dan alif atau yaa'	A	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan yaa'	I	i dan garis di atas
و	Dhammah dan waw	U	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

4. *Taa' marbuutah*

Transliterasi untuk *taa' marbuutah* ada dua, yaitu *taa' marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الْأَطْفَالِ الرَّؤُوسَةُ : *raudah al- atfal*

الْقَاضِيَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعَم : *nu”ima*

عَدُو : *’aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

عَلِي : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبِي : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruuna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), al-hamdulillah,

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fizilaal Al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al- Jalaalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ *diinullah* بِالله *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [*t*].

contoh :

hum fi rahmatillaah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama

diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

contoh:

Wa ma muhammadun illaa rasul

Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'a

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

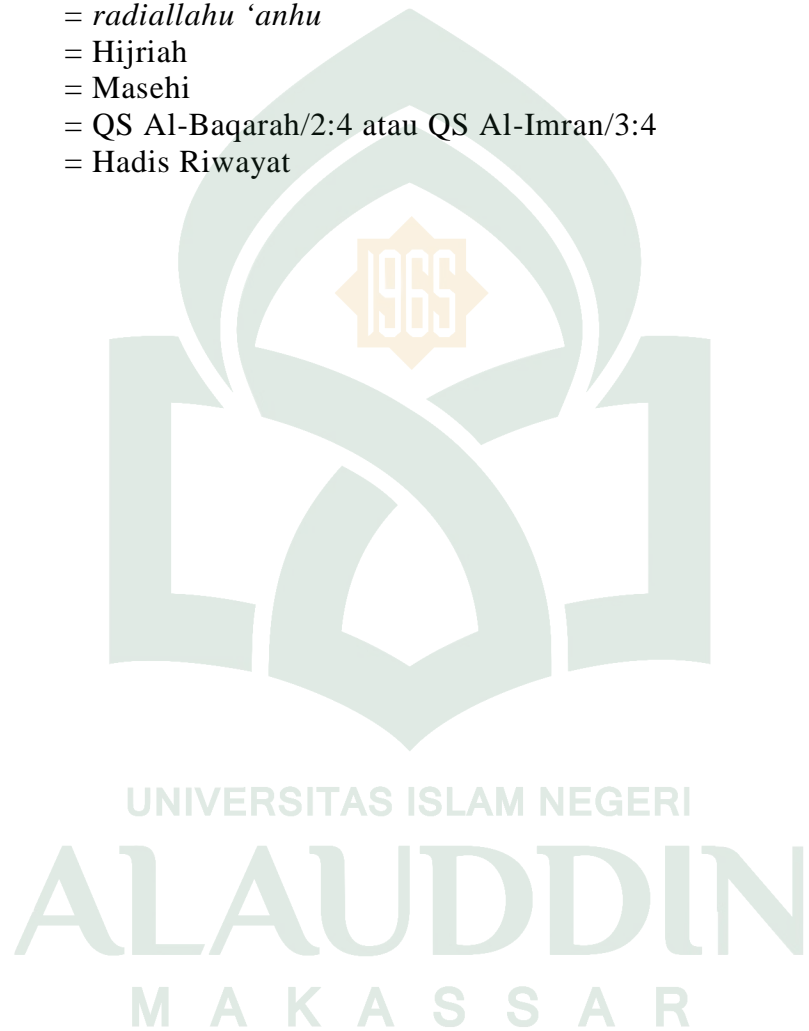
Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	= <i>subhanallahu wata'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
r.a	= <i>radiallahu 'anhu</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS.../...4	= QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat



ABSTRAK

NAMA : MUHAMMAD ASKAR
NIM : 10300113228
**JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87
TAHUN 2016 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK
PUNGUTAN LIAR PADA BIDANG PENDIDIKAN DI
KABUPATEN BULUKUMBA (PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM)**

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab, yaitu: 1) Bentuk aturan hukum tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar, 2) Implementasi dan faktor pendukung dan penghambat dari satuan tugas sapu bersih pungutan liar pada bidang pendidikan di kabupaten Bulukumba, 3) Pandangan hukum Islam terhadap ketentuan dan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif-empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan syar'i. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk aturan hukumnya berupa Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor KPTS. 725 / XII / 2016 Tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Bulukumba; 2) Implementasi satuan tugas sapu bersih pungutan liar yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Nomor KPTS. 725 / XII / 2016 Tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Bulukumba, berfokus pada pelayanan masyarakat, bentuk nyata kerja tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar di Kabupaten Bulukumba yaitu dengan adanya kasus operasi tangkap tangan di SDN 98 Bontomanai. Adapun faktor pendukung dan penghambatnya antara lain, yaitu: a) faktor pendukung internal dan eksternal, yaitu: adanya regulasi khusus, koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta peran masyarakat, b) faktor penghambat internal dan eksternal, yaitu: keterbatasan dana, sarana dan prasarana belum ada serta kurangnya sosialisasi; 3) Dalam ketentuan hukum Islam, pelaku pungutan liar termasuk dalam kategori jarimah ta'zir dikarenakan perbuatan tersebut mengandung unsur kezaliman.

Implikasi dari penelitian ini antara lain: 1) Untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli maka dibutuhkan kerjasama antara Satgas Saber Pungli Pusat dengan Satgas Saber Pungli yang ada di Provinsi, Kabupaten/Kota; 2) Pemerintah Daerah hendaknya lebih mensosialisasikan kepada seluruh instansi dan masyarakat yang ada di Kabupaten Bulukumba; 3) Satgas Saber Pungli di Kabupaten Bulukumba hendaknya menjalin kerjasama kepada para ulama guna mensosialisasikan bahwa pungli merupakan perbuatan tercela dalam Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pungutan liar (pungli) semakin marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Praktik pungli sebenarnya merupakan bagian dari tindakan korupsi.¹ Yang merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu.²

Menurut penulis pungli adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri untuk memperkaya diri sendiri dengan cara meminta pembayaran kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pungli dalam kepustakaan Islam dikenal dengan istilah *al-maks* yang berarti memungut cukai, menurunkan harga, dan menzalimi.³ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS.Asy-Syuura/42:42.

¹Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptive (korruptie). Dari bahasa belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dikutip dari Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 4.

²B. Soedarso menjelaskan panjang lebar tentang sejarah kultur Indonesia mulai zaman Multatuli berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan yang merupakan suatu sistem. Selama dalam jabatannya (maksudnya Douwes Dekker atau Multatuli), ia telah melaporkan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh Bupati Lebak dan Wedana Parangkujang (Banten Selatan) kepada atasannya dan meminta supaya terhadap mereka ini dilakukan pengusutan, Korupsi di Indonesia (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1969), h. 10 – 15.

³A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2007), h. 1352. Dikutip dari M. Nurul Irfan, *Korupsi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 131.

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.”⁴

Dalil tersebut telah memberikan gambaran bahwa praktik pungli telah menjadi fokus perhatian dalam hukum Islam. Perbuatan pungli juga dinilai sebagai perbuatan zalim dan dianggap sebagai perbuatan dosa. Hal ini dikarenakan praktik pungli merugikan orang lain (masyarakat) dan Negara.

Istilah lain yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel, dan lain-lain. Pungli pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi.⁵ Praktik pungli ini biasa dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), oknum aparat penegak hukum, hingga oknum pejabat Negara, baik di eksekutif maupun legislatif.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memprediksi total pungli diseluruh Indonesia pada tahun 2011 mencapai angka Rp. 25 triliun. Sedangkan pada tahun 2012 diperkirakan jumlah total pungli meningkat menjadi Rp. 27 - 30 triliun.⁶ Hal ini jelas merugikan Negara dan masyarakat, khususnya pelaku usaha di Indonesia.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir* (Bandung: Syaamil Quran 2012), h. 789.

⁵Soedjono Dirdjosoworo, *Pungli: Analisa Hukum dan Kriminologi* (cet. ke-2; Bandung: Sinar baru, 1983), h. 15.

⁶Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Pungutan Liar Setahun Capai Rp. 25 Triliun*, dari www.kemeperin.go.id, (16 Januari 2017).

Pemberantasan pungli sangat serius diupayakan oleh Pemerintah. Dalam rapat koordinasi dengan Gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis, 20 Oktober 2016, Presiden membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan pungli di semua lapisan pelayanan masyarakat. Pungli yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Tidak ingin hal tersebut terus terjadi, Pemerintah menegaskan kepada jajarannya di daerah untuk menyelaraskan langkah dengan Pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia.⁷

Salah satu kasus terkait pungli pada tahun 2016 yang menjadi fokus perhatian Pemerintah serta masyarakat adalah kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap sejumlah oknum pegawai Kementerian Perhubungan. OTT dilakukan atas dugaan praktik pungli terkait sejumlah perizinan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.⁸ Dari kasus tersebut Presiden langsung menginisiasi pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Satgas ini dibentuk sebagai wujud keseriusan Pemerintah dalam memberantas praktik pungli, dengan tujuan agar Indonesia dapat bebas dari praktik pungli di semua bidang.⁹ Sehingga, pada tanggal 21 Oktober 2016 disahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satgas ini kemudian dibentuk di tiap Kabupaten/Kota serta Provinsi di seluruh Indonesia.

⁷*Pungli Menyusahkan Masyarakat Melemahkan Daya Saing*, dari www.PresidenRI.go.id, (15 Januari 2017).

⁸*OTT di Kemenhub, Polisi Bekuk 6 Penerima dan Pemberi Suap*, dari www.merdeka.com, (18 Januari 2017).

⁹*Pemerintah Siapkan Satgas Saber Pungli*, dari www.metrotvnews.com, (18 Januari 2017).

Pemerintah Daerah Bulukumba bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dalam hal ini; Polres Bulukumba, Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Kodim 1411/Bulukumba, pada hari selasa tanggal 27 Desember 2016 mengukuhkan Satgas Saber Pungli Kabupaten Bulukumba. Satgas Saber Pungli diketuai oleh Wakapolres Bulukumba Kompol Agus Khaerul. Hal ini sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mendukung kebijakan Pemerintah pusat dalam memberantas praktik pungli, serta untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan publik.¹⁰

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik-praktik pungli. Hal ini disebabkan banyaknya sekolah-sekolah yang perlu diawasi, mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Khusus di Kabupaten Bulukumba, pengawasan terhadap praktik pungli di sektor pendidikan masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Karena sektor pendidikan berdampak langsung pada semua lapisan masyarakat.

Khusus di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan laporan yang dirilis oleh RADAR SELATAN bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba saat ini sedang dalam tahap menyelidiki kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan bagian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menilai sangat urgen untuk dilakukan penelitian terkait pelaksanaan pemberantasan praktik pungutan liar oleh Satgas Saber Pungli, khususnya di sektor pendidikan di Kabupaten Bulukumba dalam

¹⁰Wabub Kukuhkan Satgas Saber Pungli, dari www.bulukumbakab.go.id, (18 Januari 2017).

¹¹Kejari Selidiki Pungli PAUD, dari <http://radarselatan.fajar.co.id>, (02 Maret 2017).

Perspektif Hukum Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yakni; **Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dalam upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar pada Bidang Pendidikan di Kabupaten Bulukumba (Perspektif Hukum Islam).**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian.

Dalam penelitian ini berfokus pada Satgas Saber Pungli di Kabupaten Bulukumba, khususnya pada Bidang Pendidikan.

2. Deskripsi fokus.

- a. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti penerapan atau pelaksanaan.¹²
- b. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.¹³
- c. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) adalah suatu kelompok kerja yang dibentuk oleh Presiden yang bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah.¹⁴

¹²Arti *Implementasi Menurut KBBI dan Para Ahli*, dari www.any.web.id, (18 Januari 2017).

¹³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1* poin 6.

¹⁴Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2016 tentang *Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*, h. 1.

- d. Pungutan Liar (Pungli) adalah pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.¹⁵
- e. Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Setelah diuraikan mengenai latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan menjadi obyek pembahasan. Adapun batasan masalah yang dimaksud adalah bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar pada Bidang Pendidikan di Kabupaten Bulukumba (Perspektif Hukum Islam).

Berdasarkan pokok masalah tersebut maka akan dirumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk aturan hukum tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar ?

¹⁵R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP* (Cet. 17; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 279.

¹⁶*Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Islam*, dari www.pengertianpakar.com, (18 Januari 2017).

2. Bagaimanakah implementasi dari satuan tugas sapu bersih pungutan liar pada bidang pendidikan serta faktor apakah yang mendukung dan penghambat satgas saber pungli di Kabupaten Bulukumba ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ketentuan dan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang satgas saber pungli ?

D. Kajian Pustaka

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar pada Bidang Pendidikan di Kabupaten Bulukumba (Perspektif Hukum Islam). Ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, antara lain:

1. Jawade Hafidz Arsyad, dalam bukunya *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN)*. Dalam buku ini terdiri dari beberapa bab, yakni dimulai dari pengertian korupsi hingga strategi pemberantasan korupsi dari segi Hukum Administrasi Negara. Para pelaku cenderung memanfaatkan keadaan, seperti korupsi pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, suap-menyuap, pungutan liar, dan modus operandi lainnya. Peran negara untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, dan dengan adanya *pouvoir discretionnaire* atau *freies ermessen* kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak warga negara semakin besar karena penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi terhadap birokrat untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan *good governance*. Serta beberapa strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, Peran serta perlindungan Hukum Administrasi Negara.

2. Nurul Irfan, dalam bukunya *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Pada buku ini menjelaskan pengertian Al-Maks (pungutan liar), bentuk pungli dalam sejarah Islam, beserta dalil-dalil keharamannya.
3. Boesono Soedarso dalam buku *Korupsi di Indonesia (Suatu Masalah Kultural dan Masalah Modernasi)*. Bagi penulis, korupsi adalah suatu masalah kultural yang terus muncul di era modernisasi. Melalui pendekatan ini penulis berusaha menggali akar-akar korupsi dan ketiadaan respek atas hak asasi manusia. Dalam keadaan administrasi yang tak tertata dengan baik, ditambah keadaan serba kacau, orang sering kehilangan *sense of role*, ia merasa bukan bagian dari organisasi yang harus dijalankan secara jujur. Menariknya, dengan pendekatan kultural, penulis mencoba menarik garis 'budaya' korupsi itu ke era penjajahan Belanda. Penulis mengutip Indonesianis, W.F. Wertheim, bahwa meluasnya korupsi di sini terkait dengan *feodalisme*. Dalam tulisannya Wertheim menunjukkan pandangan-pandangan dan sikap hidup *feodal* yang secara tidak sadar masih kita teruskan. Menyetorkan sesuatu kepada orang yang melayani administrasi atau surat menyurat kita, ditambah anggapan pemberian semacam itu lumrah, bisa dijadikan indikasi langgengnya budaya *feodal*. Di masa lalu, pemerintah kolonial Hindia-Belanda mempertahankan budaya *feodal* di kerajaan-kerajaan yang sudah ada, dipertajam lagi untuk mempertahankan kekuasaannya. Hubungan berat sebelah dan tidak adil antara penguasa *feodal* kerajaan dan rakyat pribumi dibiarkan saja, dan malah dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda untuk memajukan kepentingan politik dan ekonominya. Oleh karena itu, pola budaya *feodal* yang mengatur hubungan atasan dengan bawahan telah terbentuk sempurna, dan luluh dalam kepribadian orang-orang waktu itu. Meskipun pada tahun 1870 politik Indonesia berubah menjadi politik

liberal, yang dikatakan untuk mengganti politik serba paksaan, tanam paksa dan sebagainya, tetap tidak mampu mencapai tujuannya.

4. Robert Klitgaard, Dkk. Buku yang judul aslinya adalah *Corrupt Cities. A Proctica! Guide to Cure and Prevention* ini membawa tema penting yaitu *memerangi korupsi dengan cara yang benar dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas, tidak hanya mewujudkan tata keuangan yang sehat tetapi juga menjalin hubungan antara warga masyarakat dan pemerintah daerah*. Mencegah korupsi dengan cara yang benar dapat membantu meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, memperbaiki layanan bagi warga masyarakat, membangkitkan rasa percaya (*trust*) warga masyarakat kepada pemerintah daerah, mendorong partisipasi warga masyarakat, serta membantu kepala daerah *incumbent* dapat memenangkan kembali pemilihan umum. Buku ini berfokus pada korupsi sistemik dan bukan pada perilaku beberapa orang yang melanggar hukum, lebih menekankan langkah pencegahan dan bukan langkah menghukum atau himbauan moral. Strategi pemberantasan korupsi menurut Robert Klitgaard dkk tidak menekankan pada lebih banyak kontrol, lebih banyak undang-undang, lebih banyak birokrasi serta membentuk unit pengawasan baru yang pada akhirnya hanya akanmelumpuhkan pemerintahan daerah dan dapat menimbulkan korupsi jenis baru yang lebih ganas. Strategi mereka juga meninggalkan jauh-jauh khotbah mengenai moral, pendekatan hukum, dan dongeng bahwa korupsi tidak bakal ada bila kita semua berperilaku jujur.

5. Baharudin Lopa, dalam bukunya *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Pada dasarnya seseorang yang melakukan kejahatan pasti mempunyai sebab atau alasan untuk melakukan kejahatan tersebut. Orang tersebut akan merasa puas apabila sudah mencapai tujuan dari dilakukannya kejahatan itu. Namun

sebaliknya, apabila belum tercapai tujuan dilakukannya kejahatan tersebut, maka orang itu akan berusaha untuk melakukan kejahatan itu lagi sampai tujuannya tercapai. Dengan demikian, tindak kejahatan akan semakin meningkat. Menurut Lopa, penyebab utama meningkatnya kejahatan karena pendapatan manusia tidak mampu untuk mengikuti peningkatan kebutuhan manusia tersebut yang semakin meningkat dan bermacam ragam sehingga bagi yang kurang sabar, terpaksa melakukan kejahatan (mencuri, menipu, korupsi, dan sebagainya). Selain itu, sekelompok orang yang meskipun kehidupannya sudah lumayan, namun tetap melakukan kejahatan karena faktor ingin hidup mewah dan penyebabnya di samping karena tipisnya iman, juga karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya. Untuk mencegah terjadinya peningkatan kejahatan tersebut, perlu diambil langkah-langkah yang tepat, yaitu meliputi langkah penindakan (*represif*) atau langkah pencegahan (*preventif*). Kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk tidak melakukan kejahatan, dan *prevention of crime*, yaitu suatu pencegahan kejahatan yang menitikberatkan pendekatan pada pemberatan hukuman.

6. Denny Indrayana, dalam bukunya yang berjudul *Negeri Para Mafioso, Hukum di Sarang Koruptor*. Bagi Denny, mafia peradilan di Indonesia merupakan persoalan krusial yang paling sulit diatasi. Hal ini bukan tanpa sebab. Mafia peradilan adalah sekelompok “gangster” atau oknum aparat penegak hukum yang melakukan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) secara sistematis dan rapi. Beragam cara atau modus diterapkan, mulai dari jual beli pasal, manipulasi proyek, penilepan dana, hingga penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Namun, pada hakekatnya semuanya bermuara pada satu tujuan, memperoleh uang meski dengan cara haram. Ya, Ujung-Ujungnya Duit (UUD). Secara normatif, aparat penegak hukum adalah orang-orang pilihan yang

dipercaya masyarakat untuk menjaga tegaknya keadilan. Namun, tak jarang aparat penegak hukum justru menjadi oknum “mafioso peradilan”. Hampir semua unsur penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, panitera, pegawai peradilan, makelar perkara, pihak yang berperkara hingga ahli hukum dari perguruan tinggi telah terkotori oleh perilaku korup. Bagi Denny, hal ini merupakan bukti nyata betapa *judicial corruption* telah mewabah dan menimbulkan wajah bopeng lembaga peradilan di Indonesia. Wajah bopeng lembaga peradilan di Indonesia kian lengkap tatkala para koruptor yang menjarah uang milliaran bahkan triliunan rupiah diberikan sanksi ringan atau malahan dibebaskan secara mudah.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian.

- a. Untuk mengetahui aturan hukum tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar.
- b. Untuk mengetahui implementasi dari satuan tugas sapu bersih pungutan liar pada bidang pendidikan serta faktor yang mendukung dan penghambat satuan tugas sapu bersih pungutan liar di Kabupaten Bulukumba.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap ketentuan dan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

2. Kegunaan penelitian.

a. Kegunaan teoretis

1. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan praktis

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penegakan terhadap tindak pidana pungutan liar.
2. Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang upaya pencegahan terjadinya pungli pada bidang pendidikan di Kabupaten Bulukumba yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pungutan Liar di Indonesia

1. Pengertian pungutan liar.

Adapun beberapa pengertian pungli menurut para ahli, antara lain:¹

- a. Menurut Wibawa, dkk. Pungutan liar adalah kegiatan penarikan uang yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum, yang dilakukan oleh dan untuk pribadi ataupun oknum petugas.
- b. Menurut Kotapraja. Pungutan liar adalah pungutan yang tidak resmi, yang tidak dilindungi oleh peraturan pemerintah dan undang-undang.

Jadi Pungli menurut penulis adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri untuk memperkaya diri sendiri dengan cara meminta pembayaran kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tingginya tingkat ketidak pastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.² Pada awalnya, tindakan *kolusif* dari masyarakat lebih banyak karena keterpaksaan, yaitu sebagai bentuk respons mereka terhadap kerumitan, pemaksaan dan ketidakpastian pelayanan publik.

¹Pengertian Pungli dan Contohnya, dari <https://pengertianmenurutparaahli.org>, (04 Juni 2017)

²BPKP, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat* (Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI, 2002), h. 6

Namun, pada perkembangannya masyarakat pengguna layanan justru banyak yang merasa lega ketika melakukan hal ini, atau bahkan mengharapkannya karena beranggapan hal itu dapat mempercepat urusannya, dan tidak menganggapnya sebagai praktik negatif yang merugikan berarti masyarakat kita telah ikut melembagakan praktik pungli.³

Choesnon sebagaimana dikutip oleh Artidjo Alkostar membedakan macam-macam atau jenis perbuatan korupsi sebagai berikut.⁴

a. Korupsi jenis halus.

Korupsi jenis halus ini lazim disebut uang siluman, uang jasa gelap, komisi gelap, macam-macam pungutan liar, dan sebagainya.

b. Korupsi jenis kasar.

Korupsi jenis ini kadang-kadang masih dapat dijerat oleh hukum kalau kebetulan kepergok alias tertangkap basah.

c. Korupsi yang sifatnya administratif manipulatif.

Korupsi semacam ini agak lebih sukar untuk diteliti, kalau pun memang ada dilakukan penelitian oleh yang berwenang.

2. Pungutan liar di Indonesia.

Pada masa Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), dengan tugas membersihkan pungli, penertiban

³Berdasarkan hasil penelitian dan data *Governance and Decentralization Survei* pada tahun 2002 yang menunjukkan sebahagian besar masyarakat pengguna pelayanan publik di Indonesia merasa senang dan lega jika mereka dimintai membayar pungli pada saat mengurus pelayanan publik. Dalam Agus Dwiyanto, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2003), h. 99.

⁴Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern* (FH UII Press, Yogyakarta, 2008), h. 74 dan 75.

uang dan lain-lain. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1977 Tentang Operasi Tertib bertujuan untuk menghilangkan praktik-praktik yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam aparaturnya Pemerintah yang tidak berdasarkan peraturan seperti pungli dalam berbagai bentuknya dan untuk memperbaiki serta meningkatkan daya guna dan hasil guna aparaturnya Pemerintah, diperlukan adanya langkah-langkah penertiban secara menyeluruh dan terus menerus di dalam tubuh aparaturnya Pemerintah.⁵

Pemberantasan pungli yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) yaitu Laksamana Sudomo. Jabatan Pangkopkamtib pada masa orde-baru merupakan institusi *super body* bidang politik, hukum dan keamanan. Militer, dan seluruh institusi penegak hukum di bawah kendali Pangkopkamtib. Pungli di jembatan timbang dijadikan simbol pemberantasan pungli. Karena “kebiasaan” di jembatan timbang, telah terjadi puluhan tahun. Begitu pula dengan institusi perizinan juga dituding sebagai sarang pungli.⁶

Beberapa contoh tentang bentuk penyelewengan tersebut antara lain:⁷

- a) Pungutan atas gaji/pensiun Pegawai Negeri oleh oknum instansi yang bersangkutan.
- b) Pungutan atas pengangkatan Pegawai Negeri oleh instansi yang bersangkutan.
- c) Pungutan atas biaya-biaya perjalanan pegawai oknum instansi yang bersangkutan.

⁵Wijayanto, dkk, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, (Jakarta PT Gramedia pustaka utama, 2010) h. 672.

⁶Wijayanto, dkk, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, h. 672.

⁷Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1977 Tentang Operasi Tertib.

- d) Pungutan oleh oknum-oknum instansi atas pembelian Departemen atau instansi, sehingga meningkatkan harga di luar kewajaran (dalam hal tender misalnya).
- e) Pungutan atas pemberian izin-izin seperti izin usaha, izin dagang, izin bangunan, izin kerja, paspor dan sebagainya oleh oknum instansi yang bersangkutan dalam hal melakukan pelayanan kepada masyarakat dan hal-hal semacam ini terjadi di hampir setiap instansi yang mengeluarkan, perizinan-perizinan tersebut.
- f) Pungutan-pungutan oleh oknum-oknum KPN atas penguangan SKO untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan.
- g) Pungutan-pungutan yang terjadi dalam pemasukan barang, khususnya di Bea & Cukai.
- h) Pungutan-pungutan yang terjadi dalam hal penyetoran pajak, sehingga besarnya pajak yang masuk ke Negara relatif kecil dibandingkan yang masuk ke oknum petugas pajak yang bersangkutan.
- i) Pungutan-pungutan resmi yang tidak didasarkan atas peraturan perundangundangan yang sah baik di Departemen maupun di Pemerintah Daerah.
- j) Pungutan-pungutan yang berhubungan dengan pemberian kredit oleh perbankan yang biasanya disebut "uang hangus".

Desakan publik yang kuat bagi pemerintahan baru untuk memberantas korupsi telah melahirkan Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang-Undang RI No. 3 tahun 1971, karena Undang- Undang RI No. 3 tahun 1971 dipandang oleh berbagai kalangan mempunyai banyak kelemahan, sehingga banyak koruptor

yang lolos dari jerat hukum. Dan diperbaharui lagi yaitu Undang-Undang RI No. 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Pada tahun 2004, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, terdapat 12 (dua belas) instruksi kepada para pimpinan birokrasi. Di antaranya adalah instruksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, baik dalam bentuk jasa ataupun perizinan melalui transparansi dan standardisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungli.⁹

Instruksi Presiden No.17 tahun 2011 terdiri dari 13 fokus dan 106 rencana aksi yang terdiri atas 82 aksi bidang pencegahan, 6 aksi bidang penegakan hukum, 5 aksi bidang penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, 7 aksi bidang kerja sama internasional dan penyelamatan aset, 4 aksi bidang pendidikan dan penyebaran budaya anti korupsi, serta 2 aksi bidang pelaporan.¹⁰

Pungutan yang diberlakukan pihak sekolah antara lain untuk keperluan seragam, operasional, bangunan, buku, dana koordinasi, internet, koperasi, amal jariyah, formulir pendaftaran, perpindahan guru, praktek, SPP, administrasi rapor, ekstrakurikuler, sumbangan pengembangan institusi, uang pangkal dan pungli lainnya.

Berkurangnya ruang untuk menyalahgunakan kekuasaan serta mempersulit birokrasi akan mengurangi pungli. Dengan memperbesar kemungkinan atau

⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 140.

⁹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004), h. 6.

¹⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang *Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*.

bahkan jaminan terbongkarnya praktik pungli berjamaah tentu akan menurunkan keinginan untuk melakukan Korupsi. Apalagi ketika mekanisme pengawasan dalam birokrasi menjadi semakin efektif dengan mekanisme pengawasan yang bersifat menyeluruh, terbuka, partisipatif. Mekanisme pengawasan seperti ini akan membuat semua aparatur dalam birokrasi khususnya pelayanan publik akan semakin sulit untuk melakukan pungli.¹¹

Dan pada tahun 2016 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.¹²

B. Pengaturan Pungutan Liar Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pungli merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.¹³ Meskipun menurut pendapat Penulis, pemerasan merupakan perbuatan awal, yang pada akhirnya bersama serangkaian perbuatan yang lain menghasilkan pungli. Adapun bunyi Pasal yang mengatur tentang pemerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut:

¹¹Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Publik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 235.

¹²Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 *Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*, h. 1.

¹³Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Publik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 96.

Pasal 368 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹⁴

Pasal 12 huruf e menunjuk pada Pasal 423, Pasal 12 huruf f, rumusannya mengambil dari Pasal 425 ayat (1). Termasuk pada golongan ini adalah perbuatan yang kerap dilakukan yaitu perbuatan pungli yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri. Adapun penjelasan beberapa Pasal di dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pungli adalah sebagai berikut:

1. Pasal 423 KUHP.

Pasal 423 KUHP itu berbunyi:

Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.¹⁵

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan

¹⁴R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP* (Cet. 17; Jakarta Pers, 2014), h. 229.

¹⁵R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, h. 279.

pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di dalam rumusan Pasal 423 KUHP itu merupakan suatu *bijkomend oogmerk*.¹⁶ Sehingga oogmerk atau maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu seorang pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam pasal ini.¹⁷

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang di dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain:

- a. Untuk menyerahkan sesuatu,
- b. Untuk melakukan suatu pembayaran,
- c. Untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran,
- d. Untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku.

Kebiasaan tidak mengajukan para pegawai negeri yang melanggar larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 423 atau Pasal 425 KUHP Jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ke pengadilan untuk diadili, dan semata-mata hanya mengenakan tindakan-tindakan administratif terhadap mereka itu perlu segera dihentikan, karena kebiasaan tersebut sebenarnya bertentangan dengan beberapa asas tertentu yang dianut oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang berlaku, masing-masing yakni:

¹⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 318.

¹⁷P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, h. 318.

- a) Asas Legalitas, yang menghendaki agar semua pelaku sesuatu tindak pidana itu tanpa kecuali harus dituntut menurut undang-undang pidana yang berlaku dan diajukan ke pengadilan untuk diadili.
- b) Asas *verbod van eigen richting* atau asas larangan main hakim sendiri, yakni menyelesaikan akibat hukum dari suatu tindak pidana tidak melalui proses peradilan.¹⁸

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu perkara itu hanya dapat dikesampingkan untuk kepentingan umum, dan bukan untuk kepentingan tersangka/korps atau organisasi tersangka. Perbuatan menyampingkan perkara itu tidak dapat dilakukan setiap orang dengan jabatan atau pangkat apa pun, karena menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Tahun 2004 No. 67, yang berwenang menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum itu hanyalah Jaksa Agung saja.¹⁹

2. Pasal 425 ayat 1 KUHP.

Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 425 KUHP yakni menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum dan lain-lain, yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatannya, untuk dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang unsur-unsur kejahatan ini, artinya serta syarat-syaratnya.

¹⁸P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, h. 30 dan 31.

¹⁹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, h. 189.

Pasal 425 poin 1 KUHP itu berbunyi:

Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah berutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya.²⁰

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 425 KUHP di atas menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga merupakan tindak pidana korupsi, yang sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf f, dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 membuat pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

C. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Satgas saber pungli dibentuk oleh Presiden sebagai upaya untuk memberantas pungli secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Satgas saber pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.²¹ Satgas saber pungli menyelenggarakan fungsi:²²

²⁰R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, h. 281.

²¹Peraturan Presiden Tahun 2016 Tentang *Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*, h. 1.

²²Peraturan Presiden Tahun 2016 Tentang *Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*, h. 2.

- a. Intelejen.
- b. Pencegahan.
- c. Penindakan.
- d. Yustisi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, satgas saber pungli mempunyai wewenang:²³

- a) Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli.
- b) Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan informasi.
- c) Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli.
- d) Melakukan OTT
- e) Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan public kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah.
- g) Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli.

Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungli, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik

²³Peraturan Presiden Tahun 2016 Tentang *Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*, h. 2.

dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Susunan organisasi satgas saber pungli terdiri atas:²⁵

Pengendali/penanggung jawab : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Ketua pelaksana : Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wakil ketua pelaksana I : Inspektur Jendral Kementerian Dalam negeri.

Wakil Ketua Pelaksana II : Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Sekretaris : Staff Ahli di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Anggota terdiri dari unsur :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kejaksaan Agung.
3. Kementerian Dalam Negeri.
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
6. Ombudsman republik Indonesia.
7. Badan Intelijen Negara.
8. Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia.

²⁴Peraturan Presiden Tahun 2016 Tentang *Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*, h. 5.

²⁵Peraturan Presiden Tahun 2016 Tentang *Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*, h. 2-

D. Dampak Pungutan Liar Dalam Masyarakat

Pungutan liar semakin marak terjadi utamanya dikalangan masyarakat, karena adanya proses pembiaran, baik secara politik, hukum maupun sosial. Secara politik, suburnya pungutan liar karena tingkah laku Pemerintah kota dan aparatnya. Bahkan apa yang dilakukan sekelompok orang dalam memungut retribusi liar karena terlegitimasi oleh tingkah laku oknum aparat. Apalagi, pemungut retribusi liar itu kadang menggunakan pakaian yang seolah-olah resmi.

Oleh karena itu, gejala pungli sebenarnya ialah proses duplikasi masyarakat atas tingkah laku elit. Artinya, sekelompok masyarakat meniru praktik-praktik yang dilakukan oleh elit pemerintah. Hal ini menjadi beralasan, sebab banyak juga retribusi.

Atas nama Pemerintah Kota tetapi tidak jelas akuntabilitasnya. Meski menggunakan selembar kertas yang biasanya berwarna merah atau kuning sebagai bukti, tetap saja masyarakat bertanya-tanya. Dengan kondisi itu, masyarakat kemudian boleh menduga. Apakah uang retribusi tersebut tidak masuk ke dalam laporan penerimaan Daerah. Sebab tingkah laku Pemerintah kota tampaknya menjadi akar persoalan.

Padahal, sungguh keliru kalau peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa menyelesaikan penerimaan Pemerintah. PAD tidak akan pernah punya peranan nyata terhadap usaha memperbesar penerimaan dan pengeluaran bagi pembangunan ekonomi lokal. Malah menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir, PAD seluruh Daerah di Indonesia memang meningkat. Tapi hanya sebagian kecil yang punya signifikan. Lebih dari itu, hanya sebagian kecil pula yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat, justru

dampak negatif yang muncul adalah memperburuk iklim usaha, investasi dan perdagangan. Kombinasi kedua jenis pungutan baik itu resmi atau tidak resmi.

Hal ini yang tidak disadari oleh Pemerintah Kota. Padahal akan selalu ada imbal tukar (*trade off*) antara beban pungutan dengan iklim investasi dan perdagangan dengan usaha penguatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Semakin banyak pungutan resmi dan atau pembiaran pungutan tidak resmi terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka semakin besar dampak kerugian ekonomi yang diterima. Karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas bagi siapapun yang melakukan pungutan liar.

Pada dimensi sosial, gejala pungutan liar ini tampaknya telah menjadi aturan sosial yang diformalkan. Apalagi pemahaman terhadap praktik pungli, pengemis dan premanisme menjadi bercampur baur. Masyarakat semakin sulit membedakan mana yang retribusi, pungutan liar, pengemis dan premanisme.

Dengan kondisi ini, pungli itu menjadi semacam *organized crime* yang muncul dalam bentuk pengemis yang premanistik. Maka, dengan melihat gejala ini caranya tidak lain adalah penegakan hukum yang tegas, khususnya terhadap pungli.²⁶

²⁶Skripsi Karin Novrianthy, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah Sebagai Korban Atas Pungutan Liar Yang di Lakukan Oleh Oknum Kepolisian*, h. 25-27.

E. Pungutan Liar dalam Perspektif Hukum Islam

Pungli dalam Islam dikenal dengan istilah *Al-Maks* yang berarti memungut cukai, menurunkan harga, dan menzalimi. Ibnu Manzhur juga mengartikan kata *Al-Maks* dengan *cukai* bahkan secara lebih detail ia mengemukakan:

المَكْسُ : دَرَاهِمُ كَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْ بَائِعٍ فِي الْأَسْوَاقِ فِي أَجَا هِلِيَّهٖ

Artinya:

Al-maks adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliah.²⁷

Pungli atau *cukai illegal* sudah dikenal sejak masa permulaan lahirnya Islam, bahkan sejak zaman jahiliah sudah sering terjadi kasus-kasus pemerasan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar.²⁸ Biasanya jumlah nominal yang ditetapkan sebesar 1/10 dari harta yang mereka bawa pada hari itu, sebab hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan terkadang melibatkan aparat setempat dengan membuat-buat aturan yang mengada-ada agar terkesan resmi padahal unsur kezaliman bahkan tendensi pemerasannya tetap dominan.

²⁷Ibnu Manshur, Lisan al-‘Arab, jilid 6, h. 220 dikutip dari M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, h. 127 dan 128.

²⁸Praktik-praktik pungli dan cukai illegal seperti ini pada saat sekarang di masyarakat Indonesia masih sering terjadi. Biasanya dilakukan oleh oknum atau kelompok organisasi-organisasi tertentu dan mereka menguasai tempat atau lahan-lahan tertentu di pasar-pasar. Bahkan tidak jarang, sering terjadi bentrok fisik antarmereka, misalnya karena terjadi perebutan lahan-lahan parkir, bahkan bisa terjadi antarsatu keluarga. Pada dasarnya para pihak yang terlibat dalam hal pungli dan cukai illegal seperti ini sedang kembali ke zaman jahiliah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dengan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terdaskan kebenarannya (objektif dan sah) mengenai dunia alam dan dunia sosial, penelitian dimaknai sebagai sebuah proses mengamati fenomena secara mendalam dari dimensi yang berbeda. Penelitian adalah proses sebuah ketika seseorang mengamati fenomena secara mendalam dan mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data tersebut.¹

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif-Empiris, yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Mengakaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan atau implementasi itu diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum.²

¹Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 20014), h. 8.

²Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)*, (Cet. I; Malang: Intelegensia Media, 2015), h.122.

2. Lokasi penelitian.

Penelitian ini memilih lokasi pada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Bulukumba, khususnya pada bidang pendidikan dengan argumentasi bahwa pemilihan lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.³

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.⁴

3. Pendekatan Syar'i

Pendekatan penelitian ini berdasarkan pada Hukum Islam dengan melihat apa yang ada di dalam teks-teks Al-Qur'an dan hadis serta pendapat-pendapat ulama.

³Ngobrolin Hukum, *Pendekatan dalam Penelitian Hukum* dari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com>, (04 Juni 2017).

⁴Ngobrolin Hukum, *Pendekatan dalam Penelitian Hukum* dari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com>, (04 Juni 2017).

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data penelitian dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pada bidang pendidikan di Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (responden), berkaitan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Bulukumba.

2. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Bulukumba.

D. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi.

Dalam teknik ini, pengamatan yang dilakukan peneliti harus berpokok pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan.⁵ Pengamatan ini berfokus pada satuan tugas sapu bersih pungutan liar di Bulukumba.

b. Wawancara.

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan

⁵Philips Dillah, Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2015), h.135.

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide* (panduan wawancara).⁶ Untuk mendapatkan informasi lebih, penelitian ini melakukan wawancara pada pihak yang bertanggung jawab yaitu ketua satuan tugas sapu bersih pungutan liar di Kabupaten Bulukumba, serta beberapa tokoh masyarakat.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁷ Pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen yang ada pada satuan tugas sapu bersih pungutan liar di Kabupaten Bulukumba.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei. Bagian ini menjelaskan tentang alat pengumpul data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian⁸. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai intrumen pertama.
2. Pedoman wawancara.
3. Handphone atau camera untuk dokumentasi.
4. Alat tulis.

⁶Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 193.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Cet. XXIII; Bandung: PT. Alfabeta, 2016), h.240.

⁸Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian* (Cet. I; Makassar; Alauddin Press, 2013), h. 17.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian.⁹ Setelah pengolahan data, peneliti kemudian menganalisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, artinya analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran garis besar untuk menarik suatu kesimpulan.



⁹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Ed.2, Cet. Ke-24; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi geografis Kabupaten Bulukumba.

Kabupaten Bulukumba berada di 153 KM dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak di bagian Selatan dari jazirah Sulawesi Selatan dengan luas wilayah kabupaten 1.154,67 km² atau 1,85% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara kewilayahan Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni daratan tinggi pada kaki gunung Bawakaraeng-Lompobattang, daratan rendah, pantai dan laut lepas.

Kabupaten Bulukumba terletak diantara 05⁰20' – 05⁰40' LS dan 119⁰58' – 120⁰28' BT dengan batas-batas yakni:

- a. Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Sinjai;
- b. Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone dan Pulau Selayar;
- c. Sebelah Selatan berbatasan Laut Flores;
- d. Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Bantaeng.

Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Ujungbulu (Ibukota kabupaten), Gantarang, Kindang, Rilau Ale, Bulukumpa, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. 7 diantaranya termasuk daerah pesisir sbagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu kecamatan: Gantarang, Ujungbulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. 3 Kecamatan sentra pengembangan pertanian dan perkebunan yaitu Kecamatan: Kindang, Rilau Ale dan Bulukumpa. Kabupaten Bulukumba juga mempunyai 2 buah pulau yang terdapat pada wilayah Desa Bira Kecamatan

Bontobahari yakni Pulau Liukang Loe (berpenghuni) dan Pulau Kambing (tidak berpenghuni).

Secara keseluruhan panjang garis pantai 128 km dengan luas laut $\pm 204,83 \text{ km}^2$ sangat menunjang Kabupaten Bulukumba sebagai daerah bahari/maritim dengan potensi unggulan perikanan dan kelautan.

Dari 10 Kecamatan yang ada, semua dapat ditempuh dengan mudah dan ditunjang dengan infrastruktur jalan Kabupaten yang memadai. Kecamatan yang terjauh dari Ibukota kabupaten yakni Kecamatan Kajang.¹

2. Kondisi demografi Polres Bulukumba.

Penelitian dilaksanakan di Polisi Resort (Polres) Bulukumba, jalan Pahlawan Poros Bulukumba Sinjai, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Polres Bulukumba sendiri memilih wilayah hukum seluas $1.154,67 \text{ km}^2$.

Luas wilayah hukum Polres Bulukumba sekitar $1.154,67 \text{ km}^2$ yang dipenuhi penduduk sebanyak 435.035 jiwa yang terbagi atas Laki-laki 217.515 Jiwa dan Perempuan 217.520 Jiwa. Wilayah hukum dari Polres Bulukumba, terdiri dari 10 Kepolisian Sektor (Polsek), yaitu :

- a. Polsek Gantarang ,
- b. Polsek Ujung Bulu,
- c. Polsek Ujung Loe,
- d. Polsek Bonto Bahari,
- e. Polsek Bonto Tiro,
- f. Polsek Herlang,

¹Bidang Statistik Perencanaan Pengendalian Pembangunan, dari www.bulukumbakab.go.id. (14 Juli 2017).

- g. Polsek Kajang,
- h. Polsek Bulukumpa,
- i. Polsek Rilau Ale,
- j. Polsek Kindang.

Adapun batas-batas wilayah kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Sinjai;
- b. Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone dan Pulau Selayar;
- c. Sebelah Selatan berbatasan Laut Flores;
- d. Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Bantaeng.

Luas wilayah hukum Polres Bulukumba sekitar 1.154,67 km², yang didiami oleh penduduk sebanyak 435.035 jiwa dari 10 Kecamatan.

Adapun jumlah sekolah yang ada di kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

- a. Sekolah dasar/Madrasah ibtidaiyah baik negeri maupun swasta sebanyak 387.
- b. Sekolah menengah pertama/Madrasah tsanawiyah baik negeri maupun swasta sebanyak 113.
- c. Sekolah menengah atas/Madrasah aliyah/Sekolah menengah kejuruan sebanyak baik negeri maupun swasta sebanyak 63.²

²Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Per Kabupaten/Kota : Kab. Bulukumba, dari www.referensi.data.kemdikbud.go.id. (07 Agustus 2017).

B. Bentuk Aturan Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)

Aturan hukum adalah cara dimana warga negara diatur oleh aturan hukum dan bukan dengan kekuatan orang lain. Hukum adalah proposisi hukum yang memperlakukan sama terhadap semua orang yang berada dalam situasi yang sama. Hukum diperlukan baik untuk individu sebagai bagian dari Negara sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban.³

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Adapun isi dari peraturan tersebut antara lain:

Pasal 1

- 1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.
- 2) Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:

- a. Intlijen,
- b. Pencegahan,
- c. Penindakan, dan
- d. Yustisi.

³Seputar Pengertian Aturan hukum dari www.seputarpengertian.blogspot.co.id. (07 Agustus 2017).

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar,
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi,
- c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar,
- d. Melakukan operasi tangkap tangan,
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah, dan
- g. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Pasal 5

Susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas:

Pengendali/penanggung jawab : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Ketua pelaksana : Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wakil ketua pelaksana I : Inspektur Jendral Kementerian Dalam negeri.

Wakil Ketua Pelaksana II : Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Sekretaris : Staff Ahli di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Anggota terdiri dari unsur :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Kejaksaan Agung.
3. Kementerian Dalam Negeri.
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
6. Ombudsman republik Indonesia.
7. Badan Intelejen Negara.
8. Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 6

- 1) Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan.
- 2) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.
- 3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga.

Pasal 7

- 1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- 3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 8

- 1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.
- 2) Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar.
- 3) Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.
- 4) Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.
- 5) Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.

Pasal 9

Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10

- 1) Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan.
- 2) Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli secara berjenjang.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan tata kerja kelompok ahli, kelompok kerja, dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan keamanan.

Pasal 12

- 1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Inilah yang menjadi acuan hukum bagi Satgas Saber Pungli yang ada di Provinsi baik Kabupaten maupun Kota. Adapun Alasan terbentuknya peraturan ini karena praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Maka dari itu pemerintah pusat menyuruh kepada seluruh tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk membentuk satgas saber pungli untuk meminimalisir pungutan liar yang kian marak terjadi di berbagai daerah. Maka dari itu setiap Provinsi baik Kabupaten maupun Kota untuk menerapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Untuk kebijakan lebih lanjut maka Pemerintah Daerah mempunyai wewenang tersendiri dalam menjalankan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas

Sapu Bersih Pungutan Liar. Maka Pemerintah Daerah Bulukumba berdasarkan surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor KPTS. 725 / XII /2016 Tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Bulukumba, membuat peraturan ini untuk menindak lanjuti perintah dari Pemerintah Pusat.

C. Implementasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pada Bidang Pendidikan serta Faktor Pendukung dan Penghambat Satgas Saber Pungli di Kabupaten Bulukumba

Upaya untuk meminimalisir pungutan liar yang kian marak terjadi di berbagai daerah maka diharapkan seluruh tingkat provinsi baik kabupaten maupun kota untuk menerapkan ataupun melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700 / 4288 / Sj tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ota, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka perlu membentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Bulukumba.⁴

Menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Bulukumba, yaitu

Kesatu : membentuk unit satuan tugas sapu bersih pungutan liar (satgas saber pungli) tingkat kabuten bulukumba, dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran kepuusan ini.

Kedua : tugas dan fungsi unit sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

⁴Berdasarkan lampiran *Keputusan Bupati Bulukumba tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Bulukumba.*

1. Tugas:

Memberikan pelayanan kepada masyarakat di setiap Institusi baik itu Pemerintah Daerah, Polri, maupun TNI.

2. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:

- a. Intelijen;
- b. Pencegahan;
- c. Penindakan; dan
- d. Yustisi.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua memiliki kewenangan:

- 1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- 2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- 3. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- 4. Melakukan operasi tangkap tangan;
- 5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta Bupati untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan Bupati; dan
- 7. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.⁵

Adapun isi lampiran dari Keputusan Bupati Bulukumba Nomor KPTS. 725 / XII /2016 Tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

⁵Berdasarkan lampiran *Keputusan Bupati Bulukumba tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Bulukumba.*

Tingkat Kabupaten Bulukumba yang berlaku mulai tanggal 16 Desember 2016 sebagai berikut:

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
A. PENANGGUNG JAWAB :			
1.	Bupati Bulukumba	Penanggung Jawab	
2.	Wakil Bupati	Wakil Penanggung Jawab I	
3.	Sekretaris Daerah	Wakil Penanggung Jawab II	
B. FORKOMPINDA			
1.	Dandim 1411	FORKOMPINDA	Kodim
2.	Kapolres	FORKOMPINDA	Polres
1.	Kepala Kejaksaan Negeri	FORKOMPINDA	Kejari
2.	Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba	FORKOMPINDA	DPRD
C. PELAKSANA:			
1.	Wakapolres	Ketua	Polres
2.	Inspektur Kabupaten	Wakil Ketua I	Inspektorat
3.	Kasi Intel	Wakil Ketua II	Kejari
D. SEKRETARIAT:			
1.	Kepala Bagian Operasional	Sekretaris	Polres
2.	Sekretaris Inspektorat	Wakil Sekretaris I	Inspektorat
3.	Kepala Bagian Hukum	Wakil Sekretaris II	Setda
4.	Ipda Syamsul Bahri. T	Wakil Sekretaris III	Polres
5.	Bidang-Bidang:		
	1. St. Syamsiah (Paurmin Bag. Ops)	Bidang Ops	Polres

	2. Aipda. Pawwas (Ba. Subag Sarpras)	Bidang Sarana dan Prasarana	Polres
	3. Pengatur Humaerah (Banum)	Bidang Administrasi Umum	Polres
	4. Bripka Tamrin Dg. Situju (Basikeu)	Bidang Keuangan	Polres
	5. Bripka Aspar (BA. Sitipol)	Bidang Sitipol	Polres
E. KELOMPOK KERJA			
Kelompok Kerja Unit Intelijen:			
1.	Kasat Intelkam	Ketua	Polres
2.	Pasi Intel	Wakil Ketua I	Kodim
3.	Lukman, S, SH (PS. Kaurmintu Intelkam)	Sekretaris	Polres
4.	Kasi Pidsus	Anggota	Kejari
5.	Inspektur Pembantu Wil I	Anggota	Inspektorat
6.	Ipda H. Amri S. PdI (KBO. Intelkam)	Anggota	Polres
7.	Aipda Arbiyanto (PS. Kanit. V. Intelkam)	Anggota	Polres
8.	Firdaus, SH (Staf Kejaksaan Negeri)	Anggota	Kejari
9.	Brigpol Adhiyatma. K	Anggota	Polres
10.	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota	Setda
11.	Auditor	Anggota	Inspektorat
Kelompok Kerja Unit Pencegahan:			
1.	Kasat Binmas	Ketua	Polres
2.	Letda Inf. Abd. Jabbar (Pasiter)	Wakil Ketua I	Kodim
3.	Bripka Muh. Nurdin, S.Sos	Sekretaris	Polres
4.	Inspektur Pembantu Wil II	Anggota	Inspektorat
5.	Bripka Indra Gunawan (BA. Sat. Binmas)	Anggota	Polres
6.	Bripka Baso Sufri (BA. Sat. Binmas)	Anggota	Polres
7.	Aiptu Massarappi (KBO. Sabhara)	Anggota	Polres

8.	AKP. H. Syarifuddin (Kasubag humas)	Anggota	Polres
9.	Letda Inf. Bakri (Intel Kodim)	Anggota	Kodim
10.	Sertu Sappewali (Intel Kodim)	Anggota	Kodim
11.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	Inspektorat
12.	Aiptu Saeni	Anggota	Polres
13.	Akhmad, SH	Anggota	Setda
14.	Auditor	Anggota	Inspektorat
Kelompok Kerja Unit Penindakan:			
1.	KBO. Reskrim	Ketua	Polres
2.	Inspektur Pembantu Wil III	Wakil Ketua I	Inspektorat
3.	Aipda Syamsul Bahri. T (Kasi Propam)	Sekretaris	Polres
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	Anggota	BKDD
5.	Ipda Tamsil, SKM (Kasi Was)	Anggota	Polres
6.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	Kesbangpol
7.	Ipda Abdul Muaemin, S.SoS. (Kanit Pidum Reskrim)	Anggota	Polres
8.	Brigadir Arman, SH	Anggota	Polres
9.	Aiptu Hasfuddin (BA. Siwas)	Anggota	Polres
10.	Aiptu Sukirman (Baur Provost)	Anggota	Polres
11.	Bripka Cakra Zainal, SH (Baur Paminal)	Anggota	Polres

12.	Kopda Nawir (Provost Kodim)	Anggota	Kodim
13.	Auditor	Anggota	Inspektorat
Kelompok Kerja Unit Yustisi:			
1.	Kasat Reskrim	Ketua	Polres
2.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri	Wakil Ketua I	Pengadilan Negeri
3.	Kasi Datun	Wakil Ketua II	Kejari
4.	Serda Rajuddin (Danru Provost)	Sekretaris	Kodim
5.	Inspektur Pembantu Wil IV	Anggota	Inspektorat
6.	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	DPKD
7.	Kasi Pidum	Anggota	Kejari
8.	Bripka Muh. Ali, S.Sos (Kanit Tipidkor Reskrim)	Anggota	Polres
9.	Aipda Andi Rukman (Baur Provost)	Anggota	Polres
10.	Bripka H. Wahyudi (Baur Paminal)	Anggota	Polres
11.	Bripka Ahmad Fatir (Ba. Unit Tipidkor Reskrim)	Anggota	Polres
12.	Muh. Ibnu Rahim, SH	Anggota	Kejari
13.	Auditor	Anggota	Inspektorat
14.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan	Anggota	Setda

Satgas Saber Pungli di Kabupaten Bulukumba berfokus pada pelayanan masyarakat yang notabene terjadi pungutan-pungutan di luar ketentuan yang berlaku, contohnya di salah satu pelayanan mungkin disitu aturan sengaja dipersulit sehingga orang tersebut melakukan pembayaran guna mempercepat urusannya. Pembayaran ini tidak termasuk dalam Pendapatan Daerah atau pungutan yang tidak berdasar dalam hal ini tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Untuk saat ini Satgas Saber Pungli telah melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan pungutan liar terhadap Dana Bantuan Siswa Miskin yang

mana dalam dana itu seharusnya tidak ada pemotongan yang di lakukan oleh pihak sekolah tapi kenyataannya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 98 Bonto Manai, Desa Bonto Manai, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Oknum Kepala Sekolah bekerjasama dengan pihak Bendahara Sekolah melakukan pungutan dengan dalih biaya foto copi dengan meminta uang kepada orang tua siswa yang bervariasi mulai dari 25 ribu sampai 100 ribu. Sementara dalam Juknis Program Indonesia Pintar sangat jelas bahwa tidak ada pemotongan dalam bentuk apa pun.⁶

Aturan hukum tentang pungutan liar, apabila ia seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka mengacu pada pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila ia Non PNS maka mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan pemerasan.⁷

Dalam bentuk pelaksanaanya Satgas Saber Pungli di Kabupaten Bulukumba mengacu pada tugas masing-masing seperti Tim Intelijen, Tim Pencegahan, Tim Penindakan, dan Tim Yustisi bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Contohnya tim Intelijen melakukan penyelidikan, tim pencegahan melakukan sosialisasi, tim penindakan melakukan operasi tangkap tangan dan tim yustisi melakukan penegakan hukum salah satunya melakukan penyidikan. Jadi secara struktur sangat jelas dan seluruh tim bekerja. Dalam bentuk pengaduannya ada dua yaitu sebagai berikut:

⁶Ahmad Fatir, Ba. Unit Tipidkor Reskrim Bulukumba, *Wawancara* di Polres Bulukumba, (17 Juli 2017).

⁷Ahmad Fatir, Ba. Unit Tipidkor Reskrim Bulukumba, *Wawancara* di Polres Bulukumba, (17 Juli 2017).

a. Pengaduan langsung

yaitu ketua tim beserta tim pencegahan menyebarkan kontak person yang sifatnya milik pribadi tim satgas saber pungli yang telah diberikan.

b. Pengaduan tidak langsung

yaitu tim intelijen melakukan upaya penyelidikan-penyelidikan dimana sebenarnya terjadi titik-titik pungli.⁸

Adapun faktor pendukung terkait dengan segala upaya pencegahan tindak pidana pungli di Kabupaten Bulukumba, ada beberapa faktor yang menjadi acuan untuk lebih meningkatkan dan memberdayakan supaya lebih maksimal. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberantasan pungli di Kabupaten Bulukumba, dapat dibagi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor pendukung Internal

1) Adanya regulasi khusus

Tidak hanya terdapat dalam KUHP, terdapat regulasi khusus berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Koordinasi dengan pemerintah daerah

Dalam struktur kerja satgas saber pungli melibatkan jajaran/aparat pemerintah setempat untuk meminimalisir pungli, seperti Bupati, Setda, DPRD, Inspektorat, Kejari, Kodim, dan Polres. Pelaksanaan sosialisasi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh tim pencegahan untuk meminimalisir pungli di

⁸Ahmad Fatir, Ba. Unit Tipidkor Reskrim Bulukumba, *Wawancara* di Polres Bulukumba, (17 Juli 2017).

kantor-kantor yang dianggap rawan terjadi pungutan-pungutan di daerah Bulukumba.

b. Faktor pendukung eksternal

Adapun faktor pendukung eksternal dalam upaya pencegahan praktik pungli pada bidang pendidikan di Kabupaten Bulukumba yaitu

1) Peran Masyarakat

Dengan ke ikut sertaan masyarakat setempat untuk mengawasi kelakuan para Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan kewajiban atau tugasnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan cara seperti ini akan lebih mempermudah pihak Satgas Saber Pungli untuk melaksanakan upaya pencegahan praktik pungli pada bidang Pendidikan di Kabupaten Bulukumba.

Dalam melakukan upaya pencegahan praktik pungli pada bidang pendidikan di Kabupaten Bulukumba masih menghadapi hambatan-hambatan yang sehingga mengakibatkan upaya pencegahan yang dilakukan tidak berjalan secara maksimal.

Adapun beberapa hambatan satgas saber pungli dalam melakukan upaya pencegahan praktik pungli pada bidang pendidikan di Kabupaten Bulukumba antara lain:

a. Hambatan internal.

Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam lembaga satgas saber pungli dalam upaya pencegahan praktik pungli pada bidang pendidikan yang menyebabkan kurang maksimalnya upaya tersebut, adapun hambatan internal tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Keterbatasan dana

Dalam upaya pelaksanaan pencegahan praktik pungli pada bidang pendidikan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya untuk melaksanakan sosialisasi, pengintaian maupun melakukan operasi tangkap tangan yang dilaksanakan oleh satgas saber pungli di Kabupaten Bulukumba.

2) Sarana dan Prasana belum ada

Dalam meningkatkan kinerja satgas saber pungli semestinya harus didukung dengan ketersediaan seperti kantor, perangkat operasional yaitu mobil dan lain-lain.

b. Hambatan eksternal.

Hambatan eksternal adalah hambatan dari luar lembaga satgas saber pungli yang kurang mendukung atau bahkan menghambat upaya pencegahan praktik pungutan liar di Kabupaten Bulukumba yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli kepada Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Bulukumba, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai terbentuknya tim satgas saber pungli di Kabupaten Bulukumba sehingga masyarakat tidak dapat berperan serta dalam memberantas pungli.

Dari beberapa penjelasan hambatan pencegahan praktik pungli pada bidang pendidikan diatas, maka upaya yang dilakukan oleh satgas saber pungli untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas adalah sebagai berikut anatara lain:

a. Upaya mengatasi hambatan internal.

1) Untuk mengatasi kendala berupa keterbatasan dana yang di hadapi oleh satgas saber pungli dalam upaya pencegahan praktik pungli pada bidang pendidikan dengan cara menggunakan dana secara efektif dan efisien.

2) Untuk mengatasi kendala berupa sarana dan prasarana maka satgas saber pungli memberikan kebebasan kepada seluruh tim dalam menentukan tempat pelayanan kerja.

b. Upaya mengatasi hambatan eksternal.

1) Menerapkan sosialisasi ke seluruh sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Bulukumba baik negeri maupun swasta, serta giat melakukan sosialisasi secara merata diseluruh elemen masyarakat.

Setelah dilakukan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli, ada penurunan angka praktik pungli pada bidang pendidikan di Kabupaten Bulukumba karena mereka yang tadinya agak vulgar mulai agak tertutup tapi Satgas Saber Pungli tetap akan mencari pelaku pungli. Dalam tim ini belum terbentuk dan belum fokus secara utuh untuk bekerja sebagai unit kerja yang efektif dalam artian semua tim yang ada di dalamnya masih mempunyai tugas pokok yang lain. Alangkah bagusya kalau Satgas Saber Pungli bekerja untuk memberantas pungli semata.⁹

⁹Ahmad Fatir, Ba. Unit Tipidkor Reskrim Bulukumba, *Wawancara* di Polres Bulukumba, (17 Juli 2017).

D. Pandangan Hukum Islam terhadap Ketentuan dan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli

Pungutan liar (pungli) dalam kepustakaan Islam dikenal dengan istilah *al-maks* yang berarti memungut cukai, menurunkan harga, dan menzalimi.¹⁰ Sementara maksud dari *shahib al-maks* yaitu orang yang melakukan tindakan pungutan-pungutan terhadap para pedagang yang telah membayar dengan pungutan 1/10.¹¹ Dalam hadits tersebut, dikatakan bahwa pelaku tindakan pungli berakibat bahwa ia tidak akan masuk surga. Hal ini senada dengan hadits lain yang mengemukakan masuknya ke dalam neraka bagi pelaku pungutan liar, sebagaimana dalam hadits berikut:

رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ « إِنَّ صَاحِبَ الْكَسِّ فِي النَّارِ »

Artinya:

“Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya pelaku pungutan liar ada dalam neraka”.¹²

Kerasnya sanksi yang didapat oleh pelaku pungutan liar ini dikarenakan perbuatan tersebut mengandung unsur kezaliman, hal ini dapat diketahui baik cara yang dilakukannya, maupun hasil yang diperolehnya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merampas harta orang lain dan dengan cara yang sewenang-wenang dan bukan dengan jalan yang benar.¹³ Sementara itu, sesuatu

¹⁰A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2007), h. 1352. Dikutip dari M. Nurul Irfan, *Korupsi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 131.

¹¹M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, h. 130. Maksud dari 1/10 kayaknya merupakan aturan tentang batas bayaran pajak.

¹²Ahmad bin Hanbal yang diriwayatkan oleh Yazid bin Abi Habib, hadits nomor 17464. Dalam Software CD ROM al-Maktabah al-Syamilah.

¹³M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, h. 133

yang dihasilkan dengan cara yang tidak benar, sebagaimana tindakan pungli, juga dikategorikan tidak benar.

Lebih jauh, bahwa perbuatan yang mengandung unsur kezaliman, dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa pelaku dari perbuatan zalim itu akan mendapatkan azab yang pedih, sebagaimana firman Allah dalam QS.Asy-Syuura/42:42.

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.”¹⁴

Sesungguhnya jalan untuk mengecam dan menilainya berdosa dan menilai berdosa *hanyalah atas orang-orang yang dengan sengaja berbuat zalim terhadap manusia serta melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itulah yang sungguh jauh kebejatan moralnya dan bagi mereka siksa yang pedih. Demikianlah tuntutan Allah, dan sungguh Allah bersumpah bahwa siapa yang bersabar menghadapi kezaliman sehingga tidak melakukan pembalasan dan memaafkan yang menganiayanya – selama tidak menyebabkan bertambahnya kezaliman – maka sesungguhnya perbuatan yang demikian itu luhurnya termasuk hal-hal yang diutamakan*, hal yang hendaknya dilakukan oleh orang yang mempunyai akal sehat. Dari penjelasan terlihat bahwa ajakan untuk memaafkan bukanlah pembatalan terhadap kebolehan membalas, ia hanya tuntutan untuk meraih keutamaan yang tinggi.¹⁵

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir* (Bandung: Syaamil Quran 2012), h. 789.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (15 Vol; 24 cm; Jakarta: Lentera Hati, 2002). h. 515-516.

Sementara ulama berpendapat bahwa anjuran untuk memaafkan adalah terhadap penganiaya yang menyesali perbuatannya, sedang anjuran untuk membalas setimpal adalah terhadap penganiaya yang tetap membangkang. Tetapi anjuran ini baru diterapkan bila yang bermaksud membalas memiliki kemampuan membalas dengan cepat.¹⁶

Salah satu dari kemungkaran yang tersebar di negeri ini adalah praktik pungli. Pungli ini bukan sekedar menjadi musuh dari agama kita tapi juga menjadi musuh rakyat dan pemerintah Indonesia. Sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagai upaya untuk memberantas pungli yang ada di Indonesia

Praktik pungli ini adalah salah satu dari perilaku menzalimi orang lain. Karena pungli berarti mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda dari Rabb-nya *subhanahu wata'ala*,

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Artinya:

“Wahai hambaku, sungguh Aku telah mengharamkan kezaliman pada diriKu, dan Aku telah jadikan kezaliman antara kalian sebagai perkara haram, maka janganlah kalian saling menzalimi.”¹⁷

Kezaliman itu ada dua yaitu kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah dan kezaliman yang berkaitan dengan hak manusia. Jadi sangat jelas bahwa pungli adalah perkara haram, karena mengandung kezaliman kepada orang lain dengan cara mengambil uang yang bukan haknya. Padahal pekerjaannya mengurus publik

¹⁶M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. h. 515-516.

¹⁷Ahmad bin Hanbal yang diriwayatkan oleh Yazid bin Abi Habib, hadits nomor 2577. Dalam Software CD ROM al-Maktabah al-Syamilah.

telah ada dalam gaji yang ia terima. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Baqarah /2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁸

Firman-Nya: janganlah kamu memakan harta sebagian kamu antara kamu, yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya. Harta yang dimiliki oleh si A hari ini, dapat menjadi milik si B esok. Harta seharusnya memiliki fungsi sosial, sehingga sebagian di antara apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula oleh si B, baik melalui zakat maupun sedekah. Ketika si A menganggap harta yang dimiliki si B, karena itu berarti merugikan dirinya sendiri. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia lain, dalam bentuk pertukaran dan bantu membantu. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata bainakum/antara kamu dalam firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. Kata antara mengisyaratkan juga bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah, dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi berada di

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir* (Bandung: Syaamil Quran 2012), h. 30.

tengah atau antara, dan kedudukan kedua pihak tidak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil, dan yang batil adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum serta tidak sejalan dengan tuntutan Ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.¹⁹

Salah satu yang terlarang, dan sering dilakukan dalam masyarakat, adalah mengoyok. Dalam ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwewenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah. Janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil dan menurunkan timbamu kepada hakim, yakni yang berwewenang memutuskan, dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu telah mengetahui buruknya perbuatan itu.²⁰

Sementara ulama memahami penutup ayat ini sebagai isyarat tentang bolehnya memberi sesuatu kepada yang berwewenang bila pemberian itu tidak bertujuan dosa, tetapi bertujuan mengambil hak pemberi sendiri. Dalam hal ini, yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi. Demikian tulis al-Biqā'i dalam tafsirnya. menurut penulis, isyarat yang dimaksud tidak jelas bahkan tidak benar, walau ada ulama lain yang membenarkan ide tersebut seperti ash-Shan'ani dalam buku hadisnya, Subul as-Salam.²¹

¹⁹M. Quraish Shihab, tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quran (Jakarta: Lentera hati, 2002). h. 413-414.

²⁰M. Quraish Shihab, tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quran. h. 414.

²¹M. Quraish Shihab, tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quran. h. 414.

Ayat di atas dapat juga bermakna, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwewenang memutuskan perkara bukan untuk bertujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.²²

Dari semua hadis dan ayat di atas maka penulis menyimpulkan bahwa: Kezaliman yang timbul dari perbuatan pungli tersebut dapat dilihat dari beberapa unsur di dalamnya, diantaranya:

- 1 Tidak resmi, yakni ketidakresmian terhadap pungutan yang dilakukan menyebabkan perbuatan tersebut dilandasi dengan ketidaksesuaian, dan tidak melalui kesepakatan bersama.
- 2 Pemaksaan, yakni adanya unsur paksaan yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar.
- 3 Mengurangi hak pihak lain, yakni pengambilan harta yang dilakukan pelaku pungli tentu akan berdampak pada berkurangnya harta orang yang dikenakan pungutan tersebut.
- 4 Tekanan yang dirasakan oleh pihak yang dikenakan pungutan, ia merasa tidak tenang jika perbuatan pungli tersebut terus menyimpannya.
- 5 Tidak ridha. Hal ini tentu dirasakan oleh pihak yang dikenakan pungli, dimana ia memberikan uangnya dengan rasa terpaksa sehingga menimbulkan ketidakridhaannya atas harta yang diberikannya kepada pihak pemungut tersebut.

²²M. Quraish Shihab, tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quran. h. 414-415.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Praktik Pungutan Liar Pada Bidang Pendidikan di Kabupaten Bulukumba (Perspektif Hukum Islam), maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk aturan hukumnya berupa Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, kemudian terkhusus di Kabupaten Bulukumba aturan ini diperjelas dengan adanya Keputusan Bupati Bulukumba Nomor KPTS. 725 / XII / 2016 Tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Bulukumba.
2. Implementasi satuan tugas sapu bersih pungutan liar yaitu dengan di keluarkannya Keputusan Bupati Nomor KPTS. 725 / XII / 2016 Tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Bulukumba, satuan tugas sapu bersih pungutan liar ini berfokus pada pelayanan masyarakat, bentuk nyata kerja tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar di Kabupaten Bulukumba yaitu dengan adanya kasus operasi tangkap tangan di SDN 98 Bontomanai. Adapun faktor pendukung dan penghambatnya ada dua yaitu 1) faktor pendukung internal yaitu adanya regulasi khusus dan koordinasi dengan pemerintah daerah, 2) faktor pendukung eksternal yaitu dengan ikut sertaan masyarakat, 3) faktor penghambat internal yaitu keterbatasan dana dan sarana dan prasarana belum ada, 4) faktor penghambat eksternal yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan satuan tugas sapu bersih pungutan liar kepada dinas pendidikan dan masyarakat.

3. Dalam ketentuan hukum Islam, pelaku pungutan liar termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* dikarenakan perbuatan tersebut mengandung unsur kezaliman, hal ini dapat diketahui baik cara yang dilakukannya, maupun hasil yang diperolehnya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merampas harta orang lain dan dengan cara yang sewenang-wenang dan bukan dengan jalan yang benar. Sementara itu, sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang tidak benar, sebagaimana tindakan pungutan liar, juga dikategorikan tidak benar.



B. Implikasi Penelitian

1. Untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli maka dibutuhkan kerjasama antara Satgas Saber Pungli Pusat dengan Satgas Saber Pungli yang ada di Provinsi, Kabupaten dan Kota.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba hendaknya lebih mensosialisaikan kepada seluruh instansi yang ada di Kabupaten Bulukumba dan seluruh lapisan masyarakat tentang keberadaan dari satuan tugas sapu bersih pungutan liar, serta untuk mengatasi hambatan yang dihadapi satuan tugas pungutan liar di Kabupaten Bulukumba hendaknya Pemerintah Daerah menyiapkan anggaran yang lebih dari sebelumnya, menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar guna menunjang kinerja dari satuan tugas sapu bersih pungutan liar di Kabupaten Bulukumba.
3. Satgas Saber Pungli di Kabupaten Bulukumba hendaknya menjalin kerjasama kepada para ulama guna mensosialisasikan bahwa pungli merupakan perbuatan tercela dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik Di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- BPKP, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI, 2002.
- Dillah, Philips dan Suratman. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pungli: Analisa Hukum dan Kriminologi*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Dwiyanto, Agus. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Publik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2003.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1977 Tentang Operasi Tertib.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011.
- Irfan, M Nurul. *Korupsi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan tafsir*, Bandung: Syaamil Quran, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta penjelasannya, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2015.
- Klitgaard, Robert, Dkk. *Penuntutan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Lopa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2001.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 *Tentang Satgas Saber Pungli*.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)*, Malang: Intelegensia Media, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soedarso, B. *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1969.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Wijayanto, dkk. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: sebab, akibat dan prospek pemberantasan*, Jakarta PT Gramedia pustaka utama, 2010.

INTERNET:

<http://id.wikipedia.org/wiki/pungutanliar>, (15 Januari 2017).

[http://radarselatan.fajar.co.id/Kejaksaaan Temukan Kerugian Negara Rp 300 Juta Pada Pembangunan Gedung SMKN 6 Bulukumba](http://radarselatan.fajar.co.id/Kejaksaaan_Temukan_Kerugian_Negara_Rp_300_Juta_Pada_Pembangunan_Gedung_SMKN_6_Bulukumba), (02 Maret 2017).

[http://radarselatan.fajar.co.id/Kejari Selidiki Pungli PAUD](http://radarselatan.fajar.co.id/Kejari_Selidiki_Pungli_PAUD), (02 Maret 2017).

[https://abubaidillah.com/Perang Melawan Pungli](https://abubaidillah.com/Perang_Melawan_Pungli), (09 Agustus 2017).

[https://ngobrolinhukum.wordpress.com/pendekatan dalam penelitian hukum](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/pendekatan_dalam_penelitian_hukum), (04 Juni 2017).

[https://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian pungli dan contohnya](https://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian_pungli_dan_contohnya), (04 Juni 2017).

[www.Any.web.id/Arti Implementasi menurut KBBI dan Para Ahli](http://www.Any.web.id/Arti_Implementasi_menurut_KBBI_dan_Para_Ahli), (18 Januari 2017).

[www.bulukumbakab.go.id/Wabub Kukuhkan Satgas Saber Pungli](http://www.bulukumbakab.go.id/Wabub_Kukuhkan_Satgas_Saber_Pungli), (18 Januari 2017).

[www.kemenperin.go.id/Pungutan Liar Setahun Capai Rp. 25 Triliun](http://www.kemenperin.go.id/Pungutan_Liar_Setahun_Capai_Rp._25_Triliun), (15 Januari 2017).

[www.merdeka.com/OTT di Kemenhub, Polisi Bekuk 6 Penerima dan Pemberi Suap](http://www.merdeka.com/OTT_di_Kemenhub_Polisi_Bekuk_6_Penerima_dan_Pemberi_Suap), (18 Januari 2017).

[www.metrotvnews.com/Pemerintah Siapkan Satgas Saber Pungli](http://www.metrotvnews.com/Pemerintah_Siapkan_Satgas_Saber_Pungli), (18 Januari 2017).

[www.muslim.or.id/Pungutan Liar Termasuk Dosa Besar](http://www.muslim.or.id/Pungutan_Liar_Termasuk_Dosa_Besar), (09 Agustus 2017).

[www.pengertianpakar.com/Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Islam](http://www.pengertianpakar.com/Pengertian_Dan_Ruang_Lingkup_Hukum_Islam) (18 Januari 2017).

[www.PresidenRI.go.id/Pungli Menyusahkan Masyarakat – Melemahkan Daya Saing](http://www.PresidenRI.go.id/Pungli_Menyusahkan_Masyarakat_-_Melemahkan_Daya_Saing) (15 Januari 2017).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 8838/S.01P/P2T/06/2017

Lampiran :

Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.

Bupati Bulukumba

di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI. 1/PP.00.9/2070/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **MUHAMMAD ASKAR**
Nomor Pokok : 10300113230
Program Studi : HPK
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK PUNGUTAN LIAR PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BULUKUMBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **19 Juni s/d 21 Juli 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 15 Juni 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
2. Pertinggal.

SIMAP PTSP 15-06-2017



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmmd.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax. 424836

Nomor : SL.1/PP.00.9/2016

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Samata, 12 Juni 2017

Kepada

Yth Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan,

Cq. Kepala UPT P2t, BKPM D Prov. Sul-Sel,

Di

Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Muhammad Askar
Nim	: 10300113230
Fakultas/jurusan	: Syariah Dan Hukum / HPK
Semester	: VIII
Alamat	: Perumahan Patri Abdullah.

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dalam upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar pada Bidang Pendidikan di Kabupaten Bulukumba dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hamsir, SH., M. Hum
2. Abdul Rahman kanang, M. Pd., Ph. D

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Polres Bulukumba dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terhitung mulai tanggal 19 Juni 2017 s/d 21 juli 2017

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih.

Wassalam

12 Juni 2017



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

NIP. 19621016 199003 1 003



Riwayat Hidup

Muhammad Askar, lahir di ujung pandang pada tanggal 07 Juli 1993. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Buah hati dari Abdul Karim dan ibu Jumria. Mulai memasuki jenjang pendidikan formal tahun 2000 hingga 2006 di SDN 65 Balangriri, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama pada tahun 2006 hingga 2009 di SMP Negeri 21 Makassar. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas pada tahun 2009 di SMK Negeri 1 Pallangga Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa (Sulawesi Selatan) dan tamat pada tahun 2012.

Setelah menamatkan pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) dan mengambil jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari' ah dan Hukum pada tahun 2013.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R